

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan jaman terhadap budaya dan ilmu pengetahuan, pola perilaku manusia di dalam berkehidupan dimasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. “Perilaku yang demikian apabila kita lihat dari segi norma hukum tentunya terdapat perilaku yang sudah sesuai dengan norma hukum pada umumnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum tersebut disebut juga dengan penyelewengan terhadap aturan atau norma hukum yang telah ada. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan dimasyarakat”.¹

Salah satu masalah yang memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah yaitu mengenai masalah minuman beralkohol atau biasa disebut minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja ataupun kalangan masyarakat. “Mengonsumsi minuman beralkohol atau biasa disebut miras yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang yang dapat mengarah pada tindakan *criminal*, seperti halnya ugal-ugalan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan atau keributan di tempat umum, dan juga mengganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat”.²

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

² Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, Hal. 111.

Minuman keras yaitu bahan yang mengandung alkohol yang dapat memabukan. “Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukan, yang dapat membahayakan pribadi seseorang, baik akal maupun tubuhnya, agamanya dan dunianya. Bahayanya juga berdampak pada rumah tangga yang ditinjau dari segi pemeliharanya pengurusannya terhadap istri dan anak-anak, juga bagi bangsa dan Negara baik secara spiritual, material maupun moral”.³

Daerah Kabupaten Sukoharjo sendiri adalah salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Seperti daerah otonom lainnya, Pemkab Sukoharjo selaku badan eksekutif, memiliki kewenangan untuk merancang Perda bersama DPRD selaku lembaga legislatif, seperti Perda Miras Nomor 7 tahun 2012. Kebijakan sendiri menurut Jenkins pada dasarnya dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Menurutnya, segala sumberdaya, tuntutan dan dukungan dari kebijakan (termasuk kebijakan miras) berasal dari lingkungan yang dikumpulkan dengan berbagai cara dan dipengaruhi oleh sistem perpolitikan saat itu. Sehingga relevan jika Perda Miras Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo dibuat karena sesuai dengan keadaan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto tepatnya, merupakan sentra pembuatan alkohol yang berasal dari limbah pabrik gula atau molase. Produk yang dihasilkan antara lain *bio-etanol* dengan kadar alkohol 99,5% dengan waktu distilasi 9-11 jam, *etanol* dengan kadar sampai 75% waktu distilasi 7 jam, dan *ciunik* dengan kadar 35% yang hanya memerlukan 3 jam dalam pembuatannya. Dari ketiga

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, Hal. 91.

produk ini, *ciunik*-lah yang biasa dipasarkan sebagai minuman keras, sedangkan dua lainnya dipasarkan sebagai bahan farmasi dan kimia. Pemasaran dari minuman keras tersebut sudah melingkup luar kabupaten, bahkan sampai luar provinsi Jawa Tengah. Hal ini seiring dengan berjamurnya produsen-produsen etanol yang bertambah banyak dari tahun ke tahun. Penyebabnya tidak lain adalah pendapatan bersih yang besar berkisar Rp.37-Jutaan perbulan terhitung menggiurkan.

Perda Miras Nomor 7 Kabupaten Sukoharjo itu sendiri, terdapat tiga aspek pokokdi dalamnya. Aspek-aspek seperti pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo khususnya. *Pertama*, Aspek pengawasan dan pengendalian sendiri dilakukan terhadap: (a) penjualan langsung untuk diminum, tempat peredaran dan penjualannya. (b) perizinan, importir minuman beralkohol, distributor, subdistributor. (c) tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. (d) orang/badan yang menguasai minuman beralkohol; kesemua proses pengawasan tersebut diawasi oleh tim pengawas dan penertiban yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. *Kedua*, aspek pengendalian peredaran termuat dalam dua besar inti, labelisasi dan perizinan. Labelisasi menggunakan standar operasional produk minuman keras, sedangkan perizinan kepada usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol semua golongan (A,B,dan C) harus memiliki SIUP-MB yang telah ditentukan masa tenggang dan perpanjangan. *Ketiga*, aspek penjualan mengenai syarat dan ketentuan untuk menjual secara eceran dengan ketentuan tertentu, dan

penjualan untuk diminum langsung dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pula. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan tertentu secara khusus dibanding dengan daerah lain, karena ke-khususan Kabupaten Sukoharjo sendiri sebagai ladang produksi minuman keras yang notabene legal. “Tujuan-tujuan dibentuknya Perda tersebut seperti yang tertuang di dalam butir-butir pasal Perda Miras Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo antara lain⁴:

1. Melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum.
2. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberi dasar hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
4. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah; dan Membatasi peredaran minuman beralkohol sampai lingkup terkecil.

Dalam ajaran Islam minuman keras atau miras tidaklah selalu merujuk kepada alkohol. “Di sini yang disebut dengan khamr ialah segala sesuatu minuman dan makanan yang dapat menyebabkan seseorang mabuk, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut: *“Setiap yang memabukan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram”*. (HR.

⁴ Perda No. 7 Tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo

Bukhari dan Muslim)”. Sedangkan larangan dalam mengkonsumsi minuman keras terdapat di dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91⁵:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak (minuman keras), judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sebab khamar dan judi, serta menghalang kamu dari pada ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti?”*⁶

“Minuman keras atau biasa disebut dengan miras dikalangan masyarakat sering dibicarakan sejak dari dahulu sampai sekarang, karena banyak dampak negative dalam kehidupan dimasyarakat, dampak negatifnya yaitu seperti merusak perilaku seseorang, dan juga dapat merusak kehidupan masyarakat dan lebih parahnya lagi dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan (*criminal*).” Femomena tersebut merupakan permasalahan yang cukup serius dikalangan masyarakat.⁷

“Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam

⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, Hal. 94.

⁶ *Ibid*, Hal. 92.

⁷ Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No. 4, Desember, 2017, Hal. 934.

lingkungan tersebut dapat terjamin.”⁸ Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Akan tetapi usaha tersebut kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, secara garis besar berkaitan dengan faktor pelebagaan dan pengendapan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti, perlu adanya pengutamaan usaha-usaha yang mengarah kepada efektivitas dan evaluasi. “Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum mengandung makna bahwa, para pelaku penegak hukum ialah orang-orang yang terlatih dan merasa terikat oleh hukum yang diterapkan serta sebagai pembuktian dalam pola kelakuan.”⁹ Yang kemudian dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap hukum.

“Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi.”¹⁰ Namun tidak semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri, sehingga untuk itulah

⁸ Ridwan Setiawan Daradjat, “*Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat*”, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, (Desember 2015), hal. 155

⁹ *Ibid*, hal. 247

¹⁰ Singgih Miharsi Pamungkas, 2018. *Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)*, Universitas Diponegoro Semarang , hal. 2

kedudukan Polri sebagai pelaku penegak hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan kamtibmas yang dapat dianggap sukses, dapat dilihat melalui usaha Polri dengan melakukan tatap muka dan berdiskusi secara langsung terhadap warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Indonesia. “Sebagai contoh, oleh jajaran kepolisian di Polwitabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar), Polres (Kepolisian Resort) Kota sampai dengan Polsek (Kepolisian Sektor) Kota, di kota Bandung. Pelaksanaan tersebut dilakukan guna mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut mengacu pada surat telegram Kapolda Jabar No. Pol: ST/13/I/2005 tanggal 10 Januari 2005, yang kemudian dijadikan sebagai program kerja dan program kegiatan pada setiap bagian Binamitra (Humas) di setiap Polwitabes dan Polres Kota Bandung. Dimana sosialisasi ini disampaikan di hotel-hotel, mall, perusahaan/instansi, tempat hiburan, dan sekolah-sekolah di wilayah kota dan kabupaten Bandung, yang isinya mengingatkan dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk menjalankan siskamling maupun kamtibmas di lingkungan mereka masing-masing agar aman dan terkendali.”¹¹

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul ***PERAN POLRI TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN***

¹¹ Ridwan Setiawan Daradjat, *Loc.Cit.*

***KERAS GUNA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS (Studi Atas Implementasi
PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polri terhadap implementasi perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan polri dalam melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan objektif (permasalahan yang akan diteliti) dan tujuan subyektif (pemenuhan kebutuhan perorangan) yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran polri terhadap pengendalian dan peredaran minuman keras guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan polri dalam melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana mengenai peran polri dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras.
- b. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penyusunan skripsi guna salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran serta landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras.

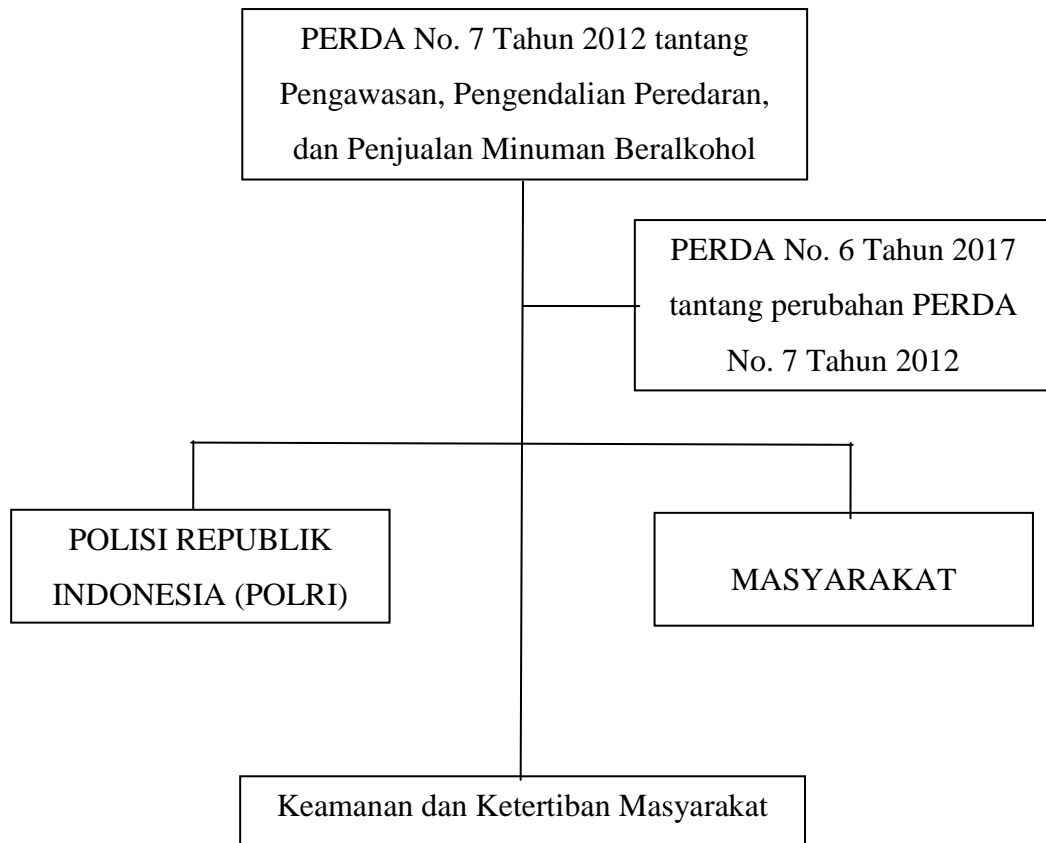
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum dan juga diharapkan menjadi bahan bacaan, sumber data dan sebagai kajian dalam penelitian berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam memudahkan pemahaman dan penulisan skripsi maka dibawah ini merupakan kerangka pemikiran mengenai peran Polri terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras guna mewujudkan

keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Sukoharjo :



Dalam memberikan perlindungan dan menjaga kewanman serta kertiban masyarkat dari dampak buruk adanya penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Sukoharjo maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan telah di ubah beberapa pasalnya sebagaimana tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2017. Penerbitan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut merupakan upaya politik hukum guna terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

Penegakan hukum harus di berikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. “Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menatap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.” Dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, di sini peran aparat penegak hukum yaitu kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tersebut.¹²

Peran aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian sangatlah penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran polri dalam penegakan hukum tersebut antara lain:

1. Peranan ideal; Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.
2. Peranan yang seharusnya; Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

“Selain peranan diatas Polisi Republik Indonesia juga mempunyai tugas yang antara lain :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.

¹² Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pers, Hal. 5.

4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.”¹³

Selain peran serta Polisi juga perlu adanya peran serta masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban yang ada dimasyarakat, hal ini karena masyarakat lah yang menjadi subyek dari Perda Kabupaten Sukoharjo tersebut.

“Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, di antaranya:

1. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kondisi Kamtibmas yang terjadi di wilayahnya.
2. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi-aksi kriminal.
3. Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada semua tingkat kehidupan masyarakat.
4. Komponen masyarakat secara rutin menjalin kerjasama dan komunikasi dengan aparat Kepolisian guna menginventarisir berbagai potensi gangguan yang dapat muncul sekaligus mencari solusinya;
5. Apabila muncul ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sarana yang tepat tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan sosial yang baru.

¹³ *Ibid*, Hal. 24.

6. Tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tetapi berupaya meredam agar isu tersebut tidak meluas”.¹⁴

F. Metode Penelitian

“Metode Penelitian merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode sistematis, serta pemikiran tertentu yang tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum yang dilakukan dengan analisis terkait bukti yang didapatkan dalam suatu permasalahan.”¹⁵

Dengan adanya metode penelitian tersebut, penulis telah menentukan metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pada metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris “yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan”. Dari segi Yuridis dalam penelitian ini dapat ditinjau dari peraturan yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras sebagai data sekunder. Sedangkan pendekatan Empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan realita yang terjadi dari pengaruh hukum terhadap

¹⁴ elisatris.wordpress.com, 7 Maret 2011, Peran Serta Masyarakat Dalam Memelihara Kamtibmas, <https://elisatris.wordpress.com/2011/03/07/peran-serta-masyarakat-dalam-menjaga-dan-memelihara-kamtibmas-2/>, di unduh pada Kamis 5 September 2019 pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

masyarakat, dengan melakukan penelitian langsung ke dalam masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dalam penelitian ini melalui wawancara dan permohonan permintaan data untuk mendapatkan data yang objektif dimana data ini merupakan data primer.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan “untuk melukiskan atau menggambarkan suatu subjek, keadaan, gejala kelompok tertentu ataupun untuk menentukan penyebaran gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala satu dengan gejala lainnya yang ada didalam masyarakat”. berdasarkan jenis penelitian tersebut penulis dapat memberikan data secara lengkap, sistematis dan menyeluruh.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini berkaitan dengan data yang akan penulis ambil yaitu di Kabupaten Sukoharjo dengan kesesuaian judul yang berkaitan dengan peran polri terhadap pengawasan dan pengendalian minuman keras guna mewujudkan Kamtibmas yang berimplementasi Perda miras Kabupaten Sukoharjo.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penjelasan diatas penulis menggunakan metode pendekatan berupa Yuridis Empiris maka sumber data yang diperlukan oleh penulis

¹⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 25.

adalah berupa data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung ditempat atau lokasi penelitian berupa hasil wawancara dari narasumber, data primer berupa informasi yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras diwilayah hukum polres sukoharjo agar terciptanya Kamtibmas.

b. Data Sekunder

“Selain data Primer yang diperoleh secara langsung, penulis juga memerlukan data sekunder yang yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan literature-literatur yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.” Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut¹⁸ :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 12.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah atau pendapat hukum yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca, dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan peran Polri dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras agar terciptanya Kamtibmas.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan meminta data dari narasumber dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. “Analisis data secara kualitatif ialah suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendiskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.” Suatu analisis ini sifatnya menggambarkan atau menjelaskan mengenai aturan-aturan yang berlaku. Proses analisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari data primer dan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder dengan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dan di analisis kemudian disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁹

G. Sistematika Skripsi

Guna mengetahui dan memberikan pemahaman dalam melakukan pembahasan dan penjabaran dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan penulisan dengan cara sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran , metode penelitian dan sistematikan skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang kajian teori mengenai tinjauan umum yang berkenaan dengan tugas pokok Polri, pengertian

¹⁹ Lex J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandaung: Rosyda Karya, Hal. 4.

minuman keras, pengertian Kamtibmas dan bentuk kerjasama polri dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan peredaran minuman keras.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang Peran Polri terhadap Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Sukoharjo

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan penelitian dan saran.